

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di suatu negara, pemerintah adalah kelompok individu atau birokrasi administratif yang mengelola mesin pemerintahan. Pemerintah berfungsi sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan negara dan memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah pergerakan negara.. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional negara pada alinea keempat. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan tingkat pendidikan dalam masyarakat, dan partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Poin-poin inilah yang menjadi dasar dan fondasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk ikut andil melaksanakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Peran pemerintah dalam melakukan pembangunan sangatlah penting, mengingat bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan kewajiban penuh untuk mengatur bagaimana negara dapat meningkatkan, memajukan dan menggalakkan pembangunan.

Dalam melaksanakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah memiliki tugas untuk selalu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melihat potensi daerah beserta karakteristik dan kearifan lokal yang dimiliki. Pada kepengurusan pemerintahan, Agrowisata adalah jenis pariwisata yang menarik minat pengunjung dengan menawarkan kegiatan pertanian, sekaligus memberikan aspek edukatif kepada mereka. Agrowisata memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan desa dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk memastikan keberlanjutan, prinsip pengembangan agrowisata harus diperhatikan dengan seksama, dengan keterlibatan aktif masyarakat sebagai kunci utama kesuksesan. (Suardana et al., 2020)

Berdasarkan “Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (204/KPTS/HK/050/4/1989 dan KM.47/PW.DOW/MPPT/89)”, agrowisata diartikan sebagai suatu jenis pariwisata yang menggunakan agrobisnis sebagai atraksi untuk mempertemukan masyarakat di sektor pertanian dengan tujuan belajar, jalan-jalan, bersantai, dan berbisnis.

Agrowisata telah menjadi sebuah bisnis yang memiliki dampak langsung pada perekonomian dan juga usaha tani serta masyarakat lokal di setiap daerah. berarti Pengembangan kawasan agrowisata mengembangkan suatu kawasan pertanian yang mengedepankan wisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu dengan adanya agrowisata, masyarakat lokal dapat mengeksplorasi kearifan lokal dengan komoditas unggulan daerah. Salah satu contoh wilayah yang terkenal dan akrab dengan agrowisata adalah Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu memberikan landasan hukum bagi berdirinya kota kecil di Jawa Timur, Kota Batu, pada tahun 2001. Semakin banyak wisatawan yang berbondong-bondong ke kota metropolitan “Kota Apel”. Masyarakat memandangi kota ini untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya di bidang perbaikan infrastruktur. Dengan meningkatnya populasi kota dan meningkatnya pembangunan perumahan, hotel, dan atraksi baru bagi wisatawan, hal ini menjadi semakin penting.

Ketika masih menjadi bagian Sub Unit Kawasan Pengembangan (SSWP) I di bagian utara, Kota Batu pernah berada di bawah Kabupaten Malang. Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan: Junrejo, Bumiaji, dan Batu, dengan total dua puluh empat desa dan kelurahan. Badan Wilayah Kota (BWK) merupakan bagian integral dari sistem yang memungkinkan setiap kecamatan melaksanakan tugas daerah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu, BWK I terutama bertanggung jawab mengembangkan pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa modern, serta kegiatan dan jasa untuk membantu pariwisata. Selain itu, pengembangan tempat pendidikan menengah di Kecamatan Batu juga termasuk dalam wilayah ini.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengidentifikasi BWK II sebagai kawasan pemukiman utama Kota Batu, pusat layanan kesehatan lokal dan regional, lokasi pendidikan tinggi, dan kawasan pendukung tempat kerja publik dan komersial di dalam kecamatan Junrejo (Riansyah et al., 2022) Di Kecamatan Bumiaji, BWK III selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan pengembangan agrowisata, kawasan wisata alam, dan kawasan lingkungan hidup. Sejumlah kelurahan Kota Batu yang tergabung dalam BWK III atau dikenal dengan Kecamatan Bumiaji merupakan daerah penghasil apel terbesar. Di antaranya

Giripurno, Bulukerto, Sumbergondo, Punten, Tulungrejo, Pandanrejo, dan Gunungsari. Suhu udara di Kecamatan Bumiaji berkisar antara 19 hingga 24 derajat Celcius, dan ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut, menjadikannya lokasi ideal untuk kebun apel. Karena (re)pembangunan pedesaan kini menjadi masalah nasional, kita perlu mengevaluasi kembali bagaimana praktik terkait lahan dan kebijakan sosio-ekonomi telah mempengaruhi kebangkitan kembali lahan apel (Chigbu et al., 2023)u

Apel dan Kota Batu sendiri merupakan branding oleh kota yang pernah mendapat julukan "De Klein Switzerland". Kota Apel ini juga memiliki beragam bentuk olahan apel yang terkenal, dari produk mentahan berupa buah apel hingga produk-produk olahan seperti sari apel, kripik apel, pie apel, cokelat apel, dodol apel hingga cuka apel. Tentunya dengan beragam bentuk produk kreativitas dari buah apel ini mengindikasikan bahwa apel adalah komoditi hortikultura unggulan di Kota Batu.

**Tabel 1.1**  
**Data Petani dan Luas Lahan Apel Di Kota Batu**

No	Desa	jumlah petani	luas lahan (Ha)
1	Sumberbrantas	13	161,970
2	Garipurno	37	270,601
3	Bumiaji	201	537,931
4	Pandanrejo	192	1,188,714
5	Gunungsari	6	8,439
6	Tulungrejo	1492	3,919,372
7	Bulukerto	879	2,253,982
8	Sumbergondo	661	899,649
9	Punten	66	85,649
10	Ngaglik	2	70,852
	total	3349	2,035,091

Sumber : Dinas pertanian kota batu 2019

Namun dengan pesatnya perkembangan Kota Batu sebagai kota pariwisata dan adanya penambahan penduduk yang menyebabkan peningkatan akan kebutuhan tempat tinggal, menyebabkan terjadinya perubahan fungsi tanah dan menyebabkan terjadinya peningkatan suhu serta perubahan unsur pada tanah yang berdampak pada produksi apel dari tahun ke tahun kian menurun, yang kemudian beriringan dengan menyusutnya lahan apel di Kota Batu. Beberapa faktor lainnya yaitu alih

fungsi lahan yang semakin meningkat dan harga apel yang tidak stabil, menyebabkan para petani tidak jarang mengalami kerugian dan memutuskan untuk beralih menanam komoditi lainnya seperti jeruk, atau menjual lahan mereka dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sekunder.

Dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi pengurangan jumlah pohon apel dan juga terjadi penurunan jumlah produksi serta produktivitas apel. Jumlah pohon apel yang ada di Kota Batu saat ini masih ada sekitar 1,8 jutaan pohon dengan jumlah luasan sekitar 1.200 Ha. Dari sejumlah pohon apel yang ada tersebut sekitar 60% merupakan pohon produktif.

**Tabel 1.2**  
**Data produktivitas pohon apel di kota batu**

Tahun	Tanaman produktif menghasilkan pohon	produksi (kuintal)	produktivitas (Kg/pohon)
2012	1.004.129,00	748,076.00	14,90
2013	1,398,851.00	838,915.00	14,99
2014	1,181,484.00	708,438.00	14,99
2015	1,115,081.00	671,207.00	15,05
2016	900,545.00	542,106.00	15,05
2017	931,523.00	558,918.00	15,00
2018	910,501.00	545,321.00	14,97
2019	857,830.00	505,525.00	14,72
2020	758,019.00	430,057.00	14,18
2021	627,616.00	350,090.88	13,95

Sumber: Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Batu 2022

Tak hanya itu saja, beberapa masalah lain seperti behavior masyarakat yang cenderung mengkonsumsi produk dan buah impor dan masih kurang dalam mengkonsumsi hasil produksi lokal. Beberapa faktor lain yaitu seperti kurang optimalnya perawatan pada tanaman apel, dimana dampak dari "Revolusi Hijau" yang membuat petani memiliki ketergantungan pada penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, serta kenaikan harga pada sarana produksi yang menyebabkan petani apel merugi dan juga umur tanaman apel yang sudah diatas 25-30 tahun juga mempengaruhi kuantitas dan kualitas produksi apel yang dihasilkan. Perubahan iklim, konversi lahan, degradasi lahan, dan hilirisasi yang tidak memadai akhir-akhir ini membayangi produksi Apple yang masih tinggi (Estri Pamungkasih et al., 2023) Akibat penurunan produksi, rantai pasokan apel mengalami gangguan karena jumlah apel tidak selalu tersedia. Bisnis makanan dan

minuman di Indonesia telah menjadi subjek studi rantai pasok yang ekstensif di masa lalu (Melly et al., 2019).

Terkait dengan perubahan iklim dalam hal ini peningkatan temperature dapat disiasati dengan melakukan adaptasi iklim (Sarvina, 2019). Revolusi hijau merupakan sebutan tidak resmi untuk menggambarkan fundamental pada teknologi pertanian di berbagai negara berkembang khususnya di Asia. Gerakan ini memiliki dampak pada perilaku petani dalam menggunakan pupuk dan pestisida kimia dengan dosis tinggi yang telah dimulai sejak tahun 1950. Sistem pertanian intensif yang digaungkan melalui revolusi hijau menyebabkan berbagai pencemaran terhadap lingkungan, seperti berkurangnya unsur zat hara pada tanah serta dapat menurunkan kesuburan tanah. Praktik ini telah berlangsung selama beberapa dekade oleh para petani dan menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan, seperti polusi tanah dan udara, degradasi lahan, serta penurunan kualitas tanah. (Bawindaputri et al., 2022).

Maka dari itu, setiap pembangunan perlu memperhatikannya dari segi keseimbangan dari segala sisi yang terdampak, bukan ekonomi saja, tetapi dari perspektif lingkungan, sosial, dan budaya. Mengutip Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai preseden Dalam rangka mempersiapkan masa depan dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, diupayakan pembangunan berkelanjutan (sebagaimana tercantum dalam poin pertama Perlindungan Lingkungan dan Bagian Manajemen). Kemampuan kita untuk menjaga lingkungan yang layak huni menentukan keselamatan, kesejahteraan, dan standar hidup generasi sekarang dan masa depan.

Dengan demikian, dapat disarikan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan di setiap daerah tentu beragam, sesuai dengan potensi daerah dan keragaman budaya. Pada wilayah agraria seperti Kota Batu, pembangunan sektor pertanian berkelanjutan tentu sangat sesuai dengan potensi lokal daerah.

Pertanian berkelanjutan adalah metode pertanian yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menimbulkan dampak merugikan pada sumber daya fisik yang tersedia, sehingga tidak membahayakan kapasitas dan potensi pertanian di masa

depan. (Reijntjes, C., Haverkort, B., & Waters-Bayer, 1999). Pembangunan sektor pertanian perlu diiringi dengan sistem pertanian intensif, sistem budidaya tanaman yang menggunakan inputan dalam skala besar seperti penggunaan pupuk, pestisida, benih unggul dan teknologi dengan tujuan efisiensi lahan untuk mendapat keuntungan yang besar. Sistem pertanian intensif akan banyak menguras unsur hara dan bahan-bahan organik dalam tanah yang menyebabkan penurunan pada kualitas tanah dan pencemaran pada tanah dan air.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tercatat berbagai strategi pemerintah Kota Batu, termasuk upaya untuk menghidupkan kembali tanaman unggulan daerah, yakni apel, yang menjadi identitas khas dari Kota Batu. Revitalisasi adalah proses memberi sesuatu kehidupan baru. Bab I Pasal (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 mendefinisikan revitalisasi sebagai upaya peningkatan kapasitas fungsional suatu kawasan melalui pembangunan kembali dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tanah atau kawasan dibandingkan dengan sebelumnya. . Secara keseluruhan, revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai kawasan dan lingkungan agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya, Namun dengan catatan dalam penerapan fungsi baru harus tetap menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung agar tidak menghilangkan memori sejarah pada masa lalu (Hermawan et al., 2019)

Menyangkut hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku instansi dan lembaga pemerintah yang berwenang pada bidang pertanian, memiliki wewenang dan untuk peranan menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanian, berkewajiban untuk mengelola dan menyusun strategi, melaksanakan sosialisasi, serta pengawasan lapangan dan evaluasi program kerja pada bidang pertanian yang salah satunya produksi buah apel melalui berbagai rancangan kegiatan dan penyuluhan bersama kelompok tani yang berada di setiap desa. Dalam menjalankan rencana strategis di bidang pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan revitalisasi lahan apel.

Menurut (Wijaya et al., 2020) Revitalisasi melibatkan pembangunan kembali suatu properti atau wilayah dengan cara yang meningkatkan fungsinya dan, secara bersamaan, meningkatkan nilainya. Ketika fungsi atau aktivitas baru dan

kontemporer diperkenalkan ke suatu wilayah, maka wilayah tersebut dikatakan mengalami revitalisasi. Selain itu, hal ini juga dapat menginspirasi munculnya usaha-usaha baru, sehingga membuat lingkungan sekitar menjadi lebih hidup secara keseluruhan (Hutsa, 2017). Revitalisasi lahan apel bertujuan untuk mengembalikan serta meningkatkan kualitas dan produktivitas buah apel. Bukan hanya itu saja, revitalisasi perlu digaungkan secara besar-besaran di Kota Batu untuk mempertahankan buah Apel sebagai kebanggaan lokal (Estri Pamungkasih et al., 2023), Mempertimbangkan fakta bahwa apel adalah tanaman yang memerlukan kondisi tertentu, yang berarti bahwa pertumbuhan dan perkembangan apel optimal hanya terjadi di wilayah-wilayah dengan iklim yang mendukung. Secara global, produksi apel didominasi oleh negara-negara yang mengalami empat musim, sementara di daerah tropis, hanya sedikit wilayah yang berhasil menghasilkan apel dengan sukses. Satu contohnya terletak di Kota Batu. Sejarah lahan apel di Indonesia sebelumnya tergantung pada impor dari negara-negara Eropa dan Australia. Namun, seiring perkembangan produksi apel di Indonesia, kebutuhan akan apel sedikit demi sedikit mulai terpenuhi melalui produksi domestik. Selain itu, ada upaya untuk mengembangkan apel sebagai komoditas dalam kawasan agrowisata dan untuk menghasilkan makanan olahan dari apel.

Batu pernah menjadi kota yang megah, dan penting bagi kita untuk tidak menyia-nyiaikan kejayaan tersebut dengan melakukan penelitian ini, yang diharapkan dapat menghidupkan kembali antusiasme masyarakat terhadap produksi apel. Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena menawarkan pendekatan berbeda dalam mengembangkan destinasi wisata yang dapat menyatukan budidaya apel dan pariwisata. Studi ini menambah pengetahuan yang ada dengan memaparkan strategi potensial untuk menghidupkan kembali pertanian apel melalui pariwisata dan dengan mengidentifikasi pemain kunci dalam gerakan ini (Pradnyana & Nugroho, 2019)

Banyak sarjana telah meneliti dan berkontribusi pada wacana pembangunan lahan terkait pengelolaan lahan dan kebijakan. Permasalahannya tidak terbatas pada geografi (Chigbu et al., 2023). revitalisasi lahan apel di Kota Batu memiliki potensi untuk membuka peluang bisnis baru dan membangkitkan kebanggaan masyarakat setempat terhadap produk lokal. Hal ini berpotensi mendongkrak perkembangan

perekonomian daerah dan memberikan dukungan bagi UMKM Kota Batu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai hal ini **“Implementasi Program Revitalisasi Lahan Apel Kota Batu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana imlementasi program revitalisasi lahan apel di kota batu?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pada implementasi program revitalisasi lahan apel di kota batu?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan judul penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui implementasi program revitalisasi lahan apel di kota batu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada implementasi program revitalisasi lahan apel di kota batu.

## **D. Manfaat**

### **1 Manfaat Teoritis**

Kami berpikir bahwa dengan melakukan penelitian ini, kami dapat menjelaskan mengapa apel khas Kota Batu dan barang-barang lokal berkualitas tinggi lainnya sangat penting bagi identitas kota tersebut. Penelitian ini menekankan perlunya revitalisasi lahan apel dan diharapkan memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu kesejahteraan sosial. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan landasan bagi penelitian masa depan di bidang ini dengan berfungsi sebagai sumber dan sumber pengetahuan lebih lanjut.

### **2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam merancang dan menerapkan kebijakan

pembangunan dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari pengembangan industri. Selain itu, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan strategi atau kebijakan yang mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat. Tujuan utama kami adalah memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, kami berharap penelitian kami dapat memberikan informasi yang berguna tentang apa yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dalam menghidupkan kembali perkebunan apel di Kota Batu dan mempertahankan barang-barang berkualitas tinggi.

## **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual diungkapkan dengan cara yang membantu untuk memahami sesuatu, bahkan jika diasumsikan bahwa sesuatu dapat dijelaskan dalam hal fitur abstrak dan hubungannya dengan entitas konseptual lainnya. Itu adalah abstraksi.

### **1. Implementasi Kebijakan**

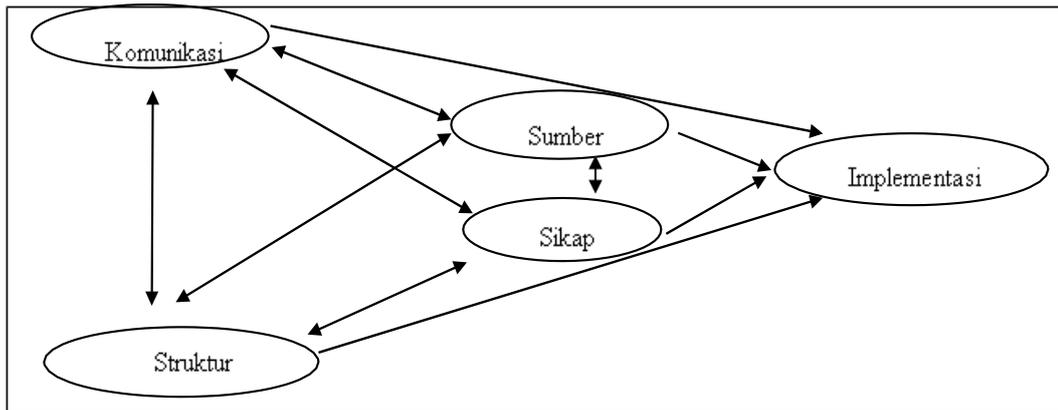
"Pelaksanaan," sebagaimana yang didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn, mengacu pada pilihan yang dibuat oleh entitas komersial, otoritas publik, atau organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Badan-badan ini melakukan tugas-tugas pemerintahan yang mempengaruhi masyarakat. Menurut (Zethary & Purnaweni, 2019) untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan, suatu program kebijakan harus dijalankan. Dalam konteks implementasi kebijakan, tahap ini merupakan bagian dari proses kebijakan yang berlangsung setelah undang-undang diberlakukan. Praktek yang berkaitan dengan tindakan kelompok atau dewan direksi. Proses pembuatan kebijakan tidak akan lengkap tanpa implementasi, karena tanpa implementasi, pilihan-pilihan tidak akan berhasil. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang mengikuti kebijakan yang sah dan melibatkan upaya untuk mengontrol input, output, atau hasil sosial.

Maksud dan tujuan kebijakan hanya dapat dicapai melalui alokasi dan penggunaan sumber daya, perumusan rencana aksi, dan penetapan target dan

sasaran. Baru setelah itu proses implementasi dapat dimulai. Untuk membantu masyarakat dalam hal-hal seperti penelitian, pendidikan, rekreasi dan hiburan, kebijakan sering kali mencakup program untuk mencapai tujuan kemasyarakatan (Trilestari, 2019). Mereka yang mempunyai kepentingan dalam suatu program atau kebijakan, atau orang yang bertanggung jawab atas pembuatan program atau kebijakan tersebut, harus memastikan pelaksanaannya. Perumusan suatu kebijakan tidak akan lengkap tanpa adanya tujuan yang terukur. Kebijakan tersebut dilaksanakan, dan tujuan-tujuan baru tercapai. Pejabat pemerintah, baik bertindak sendiri atau bersama-sama, melaksanakan implementasi kebijakan untuk mewujudkan hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut (Van Meter dan Van Horn dalam Stai Yamisa, 2023). Rumusan lebih rinci dari praktek yang dikutip oleh Winarno adalah bahwa policy enforcement terjadi sebagai berikut:

Tahap pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap mereka yang terkena dampak kebijakan. Suatu kebijakan dapat gagal meskipun implementasi kebijakan itu benar, jika kebijakan itu tidak tepat, atau jika kebijakan itu tidak memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan itu. (Eduardo III, Winarno, 2007: 174).

Studi ini mengkaji unsur-unsur keberhasilan program Teori Implementasi Kebijakan Edward III, George C. (1980:1), Implementasi kebijakan merupakan langkah penting karena tujuan kebijakan publik akan tetap tidak tercapai terlepas dari seberapa baik kebijakan tersebut dikembangkan dan dilaksanakan. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut dirancang dengan buruk sejak awal, hal ini akan menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat diperdebatkan. Oleh karena itu, sepanjang proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan selanjutnya, diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam penilaiannya, Edward menyebutkan empat faktor penting implementasi: komunikasi, sumber daya, karakter atau sikap, dan struktur birokrasi Edward III, George C. (1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. (Ayu Wulandari et al., 2022)



**Gambar 1.1**  
**Empat faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan Publik**  
**George C. Edward III**

Adapun gambaran tentang variabel-variabel tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Komunikasi Program Revitalisasi Lahan Apel Kota Batu

Komunikasi sangat penting karena melibatkan komunikasi dengan orang lain yang memiliki wewenang untuk menerimanya untuk berbagi informasi, ide, keterampilan, aturan, dll (Anwar arifin, 2005:34) Ketika mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan pilihan tersebut mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan lancar. Pelaksana harus memperhatikan dan memahami secara akurat semua komunikasi. Oleh karena itu, instruksi pelaksanaan harus dipahami dan tidak ambigu agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan tepat (Sallolo et. al, 2022).

Komunikasi merupakan indikator seberapa baik kebijakan tersebut, yang dinyatakan sebagai sebuah aturan, telah dipahami dan dapat diterapkan secara konsisten oleh pihak berwenang yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam proses mengkomunikasikan kebijakan, Edward III berpendapat bahwa ada tiga elemen yang penting: transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

a. Penyaluran Komunikasi

Pertama dan terpenting, mereka yang bertugas melaksanakan pilihan harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang harus

dilakukan. Orang-orang yang tepat perlu diberitahu tentang pilihan dan arahan kebijakan sebelum hal tersebut dapat dilaksanakan. Keakuratan dan pemahaman menyeluruh atas pesan-pesan yang disampaikan oleh para pelaksana adalah hal yang paling penting. Namun demikian, tidak jarang pilihan-pilihan yang harus diambil dan instruksi yang diberikan untuk pelaksanaannya disertai dengan penundaan dalam perkembangan peristiwa yang diantisipasi. Mereka mungkin bebas untuk memaksakan gagasannya pada suatu keputusan, meskipun pandangan tersebut berbeda dengan atasan atau acuannya, atau keputusan tersebut dapat diabaikan dan disalahpahami.

Hal ini bisa terjadi jika ada masalah dalam penyebaran informasi mengenai suatu pilihan atau permasalahan. Menurut (Winarno, 2002:7) hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keyakinan para pembuat kebijakan dan mereka yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut bertentangan satu sama lain. Kontradiksi ini menyebabkan komunikasi kebijakan menjadi terdistorsi. Alasannya adalah karena pengambil keputusan menggunakan kekuatan-kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan ketika melaksanakan keputusan tersebut.
- 2) Sejauh mana keberhasilan komunikasi kebijakan akan dipengaruhi oleh adanya hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dengan kerangka yang ketat. Perintah eksekutif dapat menyimpang karena penggunaan metode komunikasi yang tidak tepat atau tidak adanya jalur komunikasi yang jelas.
- 3) Persepsi yang terseleksi dan keengganan pelaksana kebijakan untuk memahami kebutuhan kebijakan mungkin menghambat perolehan komunikasi.

#### b. Kejelasan Komunikasi

Pemahaman dan kejelasan instruksi implementasi sangat penting agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Para pelaksana akan bingung harus melakukan apa jika arah pelaksanaannya tidak jelas. Akibat ketidaksukaan, ketidaksepakatan, atau kekhawatiran pihak-pihak tertentu

bahwa kebijakan yang ditetapkan akan merugikan atau mengecewakan pihak lain, ketidakjelasan pelaksanaan kebijakan juga dapat timbul. Mereka diperbolehkan untuk memaksakan pandangannya sendiri terhadap pelaksanaan kebijakan, yang mungkin bertentangan dengan atasannya atau pandangan yang seharusnya menjadi acuan, sehingga dapat menimbulkan ambiguitas dalam komunikasi.

c. Konsistensi Komunikasi

Dalam konteks ini, konsistensi berarti bahwa instruksi pelaksanaan yang jelas dan konsisten sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Pengetahuan tentang standar yang diterapkan terkait erat dengan sikap, persepsi, dan reaksi pihak berwenang yang menerapkannya. Jika instruksi implementasi tidak jelas dan konsisten, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan seefektif yang diharapkan. Instruksi yang bertentangan akan menyulitkan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya dengan benar, meskipun perintahnya sendiri tidak ambigu. Sebaliknya, inkonsistensi arahan implementasi kebijakan dapat menginspirasi para pelaksana kebijakan untuk berperilaku lebih mandiri dalam memahami dan melaksanakan kebijakan.

2. Sumber Daya Program Revitalisasi Lahan Apel Kota Batu

Sekalipun terdapat instruksi yang teliti, konsisten, dan jelas, implementasi kebijakan mungkin masih terhambat jika sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya tidak tersedia bagi para pelaksana. Oleh karena itu, komponen sumber daya yang penting terdiri dari:

a. Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, dan efektivitasnya bergantung pada kuantitas dan kualitas tenaga kerja mereka. Memiliki cukup orang dengan keterampilan yang tepat untuk melaksanakan kebijakan adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang memiliki cukup orang dengan kualifikasi yang tepat. Namun, tanpa keahlian yang diperlukan, jumlah pelaksana yang banyak sekalipun tidak akan cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi.

Sebaliknya, kurangnya staf yang berkualifikasi juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

b. Informasi

Informasi menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Yang kami maksud ketika kami mengatakan "informasi" adalah data yang digunakan oleh HR untuk menerapkan kebijakan. Dokumen, komunikasi, pedoman, instruksi, dan prosedur hanyalah beberapa contoh dari berbagai bentuk informasi implementasi kebijakan.

c. Sarana dan prasarana

Seluruh struktur dan sistem fisik yang sudah ada untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara kolektif disebut sebagai "fasilitas dan infrastruktur" ketika membahas sumber daya. Berhubungan langsung dengan tugas-tugas yang telah dialokasikan, dimanfaatkan secara langsung.

3. Sikap Program Revitalisasi Lahan Apel Kota Batu

Cara para pelaksana melakukan pendekatan dan mendukung penetapan suatu kebijakan itulah yang dimaksud dengan "sikap" dalam konteks ini. Salah satu aspek yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah pola pikir pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Menurut (winarno, 2004:142) Kemungkinan suatu kebijakan untuk dilaksanakan sejalan dengan keinginan pengambil keputusan awal akan meningkat ketika para pelaksana menunjukkan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Eksekusi kebijakan menjadi lebih sulit jika perilaku atau sikap pengambil keputusan tidak sejalan dengan pelaksana kebijakan. Keadaan lingkungan eksternal yang optimal juga mempunyai peran dalam seberapa baik kebijakan diterapkan,(Ginting et al., 2023).

Indikasi efektivitas implementasi kebijakan adalah ketika para pelaksana kebijakan siap untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan tanpa adanya paksaan apa pun. Namun, segala sesuatunya akan berubah jika isi kebijakan tersebut bertentangan dengan keyakinan dan sikap para pelaksana. Para pelaksana kebijakan mungkin juga memiliki bias dalam menghindari

konsekuensi kebijakan dengan mengabaikan atau selektif terhadap kriteria yang bertentangan dengan gagasan mereka.

#### 4. Struktur Birokrasi Program Revitalisasi Lahan Apel Kota Batu

Birokrasi, baik dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran, memilih struktur organisasi sebagai upaya kolektif untuk mengatasi masalah sosial dalam konteks kehidupan modern. Terkadang, organisasi ini sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu kebijakan tertentu.

Menurut (Edward III, 1980), Penggunaan SOP, atau prosedur operasi standar, dan disorganisasi adalah dua ciri khas birokrasi. Dalam upaya untuk mencapai keseragaman dalam operasionalisasi organisasi yang rumit dan luas, prosedur operasi standar (SOP) muncul sebagai reaksi internal terhadap pembatasan waktu dan sumber daya.

SOP dapat menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan baru yang memerlukan metode kerja atau jenis personel yang baru. Semakin besar perubahan yang dibutuhkan dalam pola kerja organisasi, semakin besar pula penghambatannya oleh SOP. Di sisi lain, prosedur operasi standar (SOP) memiliki kelebihan. Organisasi yang memiliki proses perencanaan dan pengendalian yang mapan dan selaras dengan program pendukung akan lebih mudah menyesuaikan diri terhadap tugas-tugas baru dibandingkan birokrasi yang tidak memiliki kualitas tersebut.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, masuk akal untuk berasumsi bahwa otoritas pelaksana tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan suatu kebijakan tanpa menyederhanakannya karena adanya SOP atau instruksi implementasi, betapapun mendasarnya kebijakan tersebut. Pendelegasian tugas kepada unit bawahan atau bahkan entitas di luar organisasi merupakan contoh fragmentasi, ciri kedua birokrasi. Fragmentasi dalam birokrasi membatasi koordinasi sehingga berdampak negatif. Birokrat menolak berkolaborasi dengan institusi lain karena alasan prioritas, padahal koordinasi diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang rumit. Struktur pemerintah yang tidak terkoordinasi membuat permasalahan ini semakin buruk; akibatnya, kebijakan-kebijakan yang

membutuhkan lebih banyak kerja sama untuk melaksanakannya mempunyai peluang keberhasilan yang lebih kecil.

Definisi di atas membuat kita berasumsi bahwa fragmentasi adalah praktik pendelegasian pekerjaan untuk memastikan tidak ada dua pekerjaan yang sama, sekaligus memasukkan pembagian kerja secara menyeluruh ke dalam proses penerapan kebijakan.

Sejumlah otoritas, seperti Van Meter dan Van Horn, Grindle, George Edward III, Mazmanian Sabatier, dan lain-lain, telah menyuarakan pendapatnya mengenai gagasan pelaksanaan kebijakan. Peneliti dalam penelitian ini memilih menerapkan teori George III dibandingkan mengandalkan pandangan karena dirasa sesuai dengan topik yang dibahas (Edward III, 1980) menegaskan bahwa penyelidikan mendasar mengenai keadaan yang memerlukan pelaksanaan kebijakan secara efektif dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk proses implementasi. Dengan mengkaji empat variabel yang telah ditetapkan—komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi—penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana program BOS dapat dilaksanakan sesuai dengan teori (Edward III, 1980).

## **2. Revitalisasi**

“Revitalisasi” aktivasi, reaktivasi, kemampuan beradaptasi terhadap masyarakat, dan “didukung oleh faktor pembangunan (lahan, tenaga kerja, modal, keterampilan, kewirausahaan, lembaga keuangan, birokrasi, sarana/prasarana fisik)” merupakan definisi luas dan mendasar yang diberikan. Pelaku pembangunan memiliki tantangan dan kebutuhan struktural dan operasional baru” (sri edi swasono, 2002).

Revitalisasi perkebunan mensyaratkan pengakuan atas penggantian yang proporsional dan kontekstual terhadap pentingnya sektor perkebunan. Dalam hal menyegarkan kembali vitalitas sektor perkebunan yang sedang berkembang, meningkatkan keterampilannya dan meningkatkan kinerjanya tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Regenerasi bukan tentang mengembangkan perkebunan secara intensif dari atas ke bawah dengan biaya berapa pun, juga bukan penggalangan dana berbasis

proyek. Revitalisasi merangsang partisipasi dan kerjasama semua pemangku kepentingan dan mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang sektor perkebunan tidak hanya sebagai lahan produksi bahan mentah (Eugenio Lucio, 2000). Perkebunan memiliki dua fungsi, tetapi tidak dihargai oleh penduduk setempat. Pertanian merupakan mata pencaharian dan penghidupan bagi kebanyakan orang. Masalah utama dalam merehabilitasi hutan tanaman adalah:

- a. Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi. (2) keberadaan kelembagaan dan layanan pendampingan petani semakin berkurang; (3) luas tanam kecil; (4) Akses petani terhadap sumber produksi masih sangat terbatas; (5) hasil tanam. Rendahnya produktivitas dan rendahnya nilai tambah produk pertanian dari perkebunan pohon.

Tujuan revitalisasi perkebunan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di sektor perkebunan, membangun industri perkebunan yang berdaya saing, meningkatkan swasembada, dan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Terakhir, peningkatan pendapatan per kapita petani dapat diamati dalam tiga dimensi:

#### 1) Dimensi ruang

Dari segi fisik, ekonomi, dan sosial, kawasan industri masyarakat perkebunan merupakan lokasi yang mendukung sistem dan aktivitas pertanian berbasis perkebunan melalui pemanfaatan komponen fisik seperti: Sebuah perbaikan 1). Perkebunan budaya dan kemungkinan pengembangannya. 2). Perkebunan rakyat dan perkebunan yang pendapatan utamanya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari kegiatan perkebunan. 3). sarana dan prasarana penunjang. D). Ada hubungan aktivitas antar komponen

#### 2) Dimensi waktu

Wilayah industri rakyat proses operasional subsistem kooperatif dari sistem komersial dan pertanian di kawasan, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tanaman dan penduduk lokal untuk mencapai kondisi yang diharapkan pada tahap pengembangan perencanaan

jangka pendek. masa depan, dalam waktu dekat dan jauh di masa depan.

### 3) Dimensi Manajemen

Wilayah Industri Rakyat Perkebunan memiliki sistem dan operasi adibisnis berbasis perkebunan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dan inklusi ekonomi oleh masyarakat lokal dan entitas ekonomi perkebunan di wilayah tertentu untuk mencapai peningkatan kesejahteraan bersama. Ini adalah kesepakatan untuk dilaksanakan. harmonis, adil dan berkelanjutan

## **F. Definisi Operasional**

Deskripsi peran Artinya, variabel ditentukan oleh operasi yang diperlukan untuk mengukur, mengkategorikan, atau memodifikasinya, serta oleh fungsi atau implementasi yang mendefinisikan tindakan tersebut. Untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis, definisi operasional menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca laporan penelitian. Definisi operasional memberikan gambaran menyeluruh tentang cara mengamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menentukan integritasnya. Variabel yang dinyatakan dalam alat penelitian dan definisi fungsionalnya. Definisi operasional kebijakan rehabilitasi. Definisi yang berguna didasarkan pada Teori George C. Edwards III (1980). Metode pelaksanaan terdiri dari empat aspek.

1. Menciptakan ikatan yang kuat antara kelompok dan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi mana pun, tidak terkecuali Program Revitalisasi Lahan Apel di Kota Batu. Pelaksana yang memiliki informasi yang baik sangat penting untuk kelancaran penerapan kebijakan apa pun. Penting untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan kebijakan kepada khalayak yang dituju untuk meminimalkan distorsi implementasi. Kelompok sasaran kemungkinan besar akan menentang suatu kebijakan jika mereka tidak memahami atau tidak mengetahui maksud dan tujuan kebijakan tersebut.

2. Sumber daya inisiatif revitalisasi lahan apel di Kota Batu dinilai dengan menentukan siapa saja yang terlibat. Sekalipun substansi kebijakan telah dinyatakan secara konsisten dan efektif, implementasinya akan gagal karena kurangnya sumber daya. Oleh karena itu, sumber daya merupakan elemen penting untuk dipertimbangkan. Sumber daya manusia, yaitu pelaksana yang kompeten, dan sumber daya keuangan adalah dua contoh yang bisa dianggap sebagai sumber daya. Ketersediaan sumber daya sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan hanyalah selembar kertas yang tidak ada artinya jika tidak ada dana untuk mewujudkannya.
3. Integritas, dedikasi, keterbukaan terhadap masukan, dan semangat demokrasi membentuk disposisi pelaksana program revitalisasi lahan apel dalam menjalankan tugasnya. Memang benar, agar program rehabilitasi lahan apel di Kota Batu dapat dilaksanakan secara efektif, pengambil kebijakan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan. Jika orang yang bertugas melaksanakan kebijakan mempunyai sikap positif, maka pencipta kebijakan akan senang dengan hasilnya. Hal lain yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan adalah situasi di mana sikap atau sudut pandang pelaksana kebijakan berbeda dengan sikap atau sudut pandang pengembang kebijakan.
4. Struktur birokrasi program peremajaan lahan apel dicirikan oleh dua ciri utama: pertama, adanya Standar Operasional Proses (SOP) yang merupakan kumpulan proses kerja dan langkah-langkah mendasar; dan kedua, adanya fragmentasi birokrasi. Eksekusi kebijakan dalam program revitalisasi lahan apel Kota Batu sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang berwenang dalam pelaksanaannya. Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan bagian penting dari struktur organisasi karena memberikan peta jalan yang harus diikuti oleh seluruh pelaksana. Jika struktur organisasi terlalu rumit, hal ini dapat mengganggu pengawasan dan menimbulkan birokrasi dalam bentuk proses yang panjang dan sulit. Operasi organisasi mungkin menjadi kaku sebagai konsekuensinya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Analisis data dalam penulisan kualitatif kedepannya akan dibantu dengan metodologi penelitian deskriptif ini. Bogdan dan Taylor dalam (Hendra Mahlil, 2018) menjelaskan metode kualitatif sebagai pendekatan studi yang, bila digunakan, memberikan informasi deskriptif tentang bahasa tertulis dan lisan serta perilaku subjek manusia. Metode deskriptif tidak membatasi pengumpulan, analisis atau interpretasi data. Kemampuan peneliti dalam mengolah informasi yang diterima juga banyak bergantung pada observasi dan wawancara. Untuk fokus pada permasalahan yang diangkat, kami mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi dari narasumber tentang pelaksanaan program revitalisasi kebun apel di Kota Batu.

### **2. Subjek Penelitian**

Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yang disebut purposive sampling untuk memilih orang yang diwawancarai. Informan dalam penelitian ini secara khusus adalah mereka yang mengetahui dan memahami konsentrasi penelitian tentang implementasi program revitalisasi di kota batu Adapun informan pada penelitian ini antara lain:

Petani Apel	: 3 Orang
SubKoordinator/Staf Perlindungan Pertanian	: 2 Orang
Penyuluh Pertanian Lapangan	: 1 Orang

- a. Sub Koordinator Bidang Revitalisasi/Staff Perlindungan Pertanian, Ibu Retno Indahwati, S.P., M.S.i Peneliti menganggap informan memahami dalam pelaksanaan program revitalisasi lahan apel di kota batu.
- b. Penyuluh Pertanian Lapangan, Peneliti menganggap bahwa informan memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan kebijakan program revitalisasi lahan apel di kota batu.
- c. Warga petani apel yang telah melaksanakan atau merasakan pelayanan pada program revitalisasi lahan apel, sebagai pihak yang mendapatkan dampak dari pelaksanaan pelayanan melalui program revit.

Di sini, peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan

tentang subjek penelitian dan yang tanggung jawab utamanya selaras dengan tujuan penelitian.

### 3. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan sumber informasi primer dan sekunder. Kami akan membahas lebih detail hal-hal berikut:

#### a. Data primer;

Data primer adalah segala jenis informasi penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya (tanpa menggunakan perantara) baik dari individu maupun kelompok. Oleh karena itu, informasi diperoleh secara langsung. Data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan jelas. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa wawancara pada awalnya digunakan untuk menyediakan data, mengingat penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian kualitatif. Karena wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka terkait dengan topik penelitian, diharapkan data dan pertanyaan informan dapat dikembangkan dan digunakan untuk memberikan informasi data penting untuk penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dari informasi yang perlu dilakukan dengan sengaja (bukan secara acak), misalnya menemukan variasi atau hal-hal yang diketahui tentang unsur-unsur yang ada. Saat menganalisis informasi, beberapa informasi terpenting harus dipertimbangkan untuk membedakan istilah secara keseluruhan.

- 1) Enkulturasasi penuh.
- 2) Partisipasi langsung.
- 3) Kondisi lapangan yang tidak normal.
- 4) Cukup waktu.
- 5) Tidak analitis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelum melakukan penyelidikan. Bukti, makalah sejarah, laporan yang dikumpulkan dalam arsip, dan dokumentasi data merupakan contoh data sekunder. Data sekunder adalah data yang termasuk data primer.

"Sekunder" mengacu pada data yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur dan metode yang dijelaskan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan pengumpulan data, karena keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan untuk melakukan penelitian berdampak signifikan pada kualitas penelitian. Apa, dimana, kapan dan bagaimana selalu menjadi pertimbangan saat mengumpulkan data. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan triangulasi data dari tiga sumber yang berbeda: observasi partisipan, wawancara, dan analisis dokumen. Berbagai informasi yang ada dapat dikumpulkan dengan menggunakan hasil wawancara dengan penyedia informasi, hasil observasi di lembaga penelitian dan situs, dan dokumen untuk mengumpulkan dan mencatat berbagai jenis informasi yang ada. Metode berikut dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk penelitian ini.

##### **a. Observasi**

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi adalah dengan mengamati fenomena sosial yang diteliti. Rumusan masalah dan perbandingan dengan realitas lapangan juga relevan untuk observasi. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi subjek penulisan, waktu dan cara penulisan dilakukan. Selama observasi, interaksi antara partisipan dan pengamat diperlukan agar penulis dapat menggunakannya untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan di Kota Batu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Alternatifnya, mereka tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Program Revitalisasi properti Apple, yang mencakup pembangunan kembali sebagian properti agar lebih bermanfaat dibandingkan sebelumnya, melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanian, berkewajiban untuk mengelola dan menyusun strategi, melaksanakan sosialisasi, serta pengawasan lapangan dan evaluasi program kerja pada bidang pertanian yang salah satunya produksi buah apel melalui

berbagai rancangan kegiatan dan penyuluhan bersama kelompok tani yang berada di setiap desa.

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan Saat informasi dipertukarkan antara dua manusianya melalui pertukaran tanya jawab, makna mendalam dari objek tertentu dapat dibangun. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan atau Tanya jawab dengan orang-orang atau narasumber yang kredibel, yang mengarah pada penyelidikan masalah yang lebih menyeluruh. Selain itu, seorang wawancara dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang informasi atau dokumen yang sulit untuk dipahami. Untuk mendukung penelitian ini dilakukan wawancara dengan berbagai pihak antara lain pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program revitalisasi lahan apel kota batu, termasuk kepala seksi bidang revitalisasi, staf bagian sistem informasi program revitalisasi, dan beberapa masyarakat yang terlibat dalam program revitalisasi kota batu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi untuk meneliti dan merekam data dalam laporan dan arsip, yang digunakan untuk menghasilkan informasi terkait penelitian secara jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Hal ini karena ketika informasi dikumpulkan hanya melalui wawancara dan observasi, pentingnya informasi tersebut belum tercermin dalam penyusunan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan dokumentasi pendukung berupa memo, gambar, data, undang-undang dan kajian-kajian terdahulu terkait revitalisasi kawasan perkebunan apel di Kota Batu.

## **H. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dikantor dinas pertanian dan ketahanan pangan di kota batu. Penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif yang mencakup pengamatan yang lebih jelas dan sederhana untuk memperoleh fakta objektif.

## I. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data ini adalah untuk memberikan pencerahan baik pada data penelitian maupun observasi lapangan. Reduksi data, penyajian data, dan inferensi/verifikasi merupakan tiga metode analisis data interaktif yang digunakan untuk mengkaji data penelitian. Narasi berdasarkan data ini menunjukkan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengikuti prosedur yang diuraikan dalam pendekatan analisis data yang disarankan “oleh (Miles Huberman, 1994) sebagai berikut :

### 1. Reduksi data (Data reduction)

Reduksi data adalah tempat Anda memilih informasi untuk disorot dalam ringkasan Anda. Berikan perhatian dengan berfokus pada hal-hal yang penting, mengidentifikasi tren, dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Jadi, peneliti akan bisa melihat lebih jelas berkat berkurangnya data, dan mereka akan lebih mudah mengumpulkan lebih banyak data dan melakukan lebih banyak pencarian jika diperlukan. Dalam reduksi data alat elektronik juga dapat membantu dengan menawarkan fitur khusus yang mempermudah proses reduksi data.

### 2. data (Data display)

Penyajian data merupakan tahap selanjutnya setelah reduksi data selesai. Ini mengambil bentuk deskripsi, diagram, hubungan antar kelas, dan sejenisnya. Langkah ini menjelaskan kasus dan berfungsi sebagai panduan tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis fakta yang disajikan dalam informasi. Kemudian membahas data yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk melihat korelasi dalam data.

### 3. Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing)

Tahap ini merupakan penarikan kesimpulan dari semua data yang dikumpulkan selama proses penelitian. penetapan atau pembuktian dalam upaya memastikan atau memahami maksud, serta rancangan, penjelasan, dan rantai sebab akibat. Informasi yang dikumpulkan melalui identifikasi informasi, membuat penilaian, atau meninjau penelitian harus dipertimbangkan sebelum menarik kesimpulan apapun. Penentuan prestasi adalah tahap terakhir dari investigasi sebelum peneliti menarik kesimpulan

apapun. Jadi, langkah terakhir dalam mencerna data kajian adalah merumuskan kesimpulan.

4. Waktu Penelitian Jangka waktu yang digunakan untuk pengumpulan data atau informasi, penyusunan laporan, dan penelitian disebut dengan waktu penelitian. Dibawah ini merupakan rancangan waktu pada pelaksanaan penelitian.

